

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Komisi C Tolak Wacana DKI Tarik Pajak Ojol

### Palmerah, Warta Kota

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Nazar Soesatyo menolak rencana pengenaan pajak ojek online (ojol) dan toko online. Putra dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) ini menilai, wacana Pemprov DKI Jakarta itu dapat membebani keuangan rakyat kecil.

"Mengenai wacana pengenaan pajak untuk ojek online menurut saya kurang tepat mengingat para pengemudi ojek online ini biasanya masyarakat berpenghasilan rendah," kata Dimaz pada Ahad (29/10/2023).

Dimaz mengatakan, meski pajak ini dibebankan ke pengguna ojol tentunya akan tetap mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan begitu dapat berimbas bagi pendapatan pengemudi, apalagi saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi imbas pagelbluk Covid-19.

"Dalam pengenaan pajak untuk toko online ini juga sedikit susah monitoring dan controllingnya karena toko online ini kan tidak memiliki domisili dan bisa berada bukan di Jakarta," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, kata dia, rencana pengenaan pajak itu bisa memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah lewat sektor pajak. Terlebih pajak itu menjadi sumber pendapatan baru untuk daerah.

"Jadi efektif atau tidaknya berbicara menambah tentu pemasukan pajak akan bertambah dengan ada pengenaan pajak

terhadap hal baru namun saya pikir kurang bijak dilakukan," paparnya.

Jika wacana itu disetujui, Dimaz mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap toko online. Dia ragu, pemerintah daerah dapat maksimal mengawasinya demi pendapatan daerah yang lebih besar.

"Tentunya monitoring dan controlling akan sangat sulit untuk toko online karena toko online ini bisa berdomisili di mana saja walaupun mencantumkan daerahnya pada marketplace misalnya," pungkasnya.

Sementara itu Komisi B DPRD DKI Jakarta memberi catatan pada realisasi target pendapatan pajak parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) yang jauh dari harapan.

Pada Perubahan APBD tahun 2023 Dishub memutuskan untuk mengurangi target pendapatan pajak parkir dari Rp 800 miliar menjadi Rp 450 miliar lantaran di triwulan kedua tahun ini baru terealisasi 29,08 persen atau Rp 232 miliar.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, meminta Dishub untuk membuat terobosan. Salah satunya dengan menyiapkan kajian untuk mengurangi titik parkir liar untuk diubah menjadi parkir resmi atau legal.

"Kami sarankan agar membuat kajian, agar nanti penertiban yang dilakukan ini bukan saja menghilangkan adanya parkir liar tapi justru menghasilkan suatu potensi pendapatan," kata Ismail berdasarkan keterangannya pada Minggu (29/10/2023). (faf)